KOMUNITAS
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Vol. 10, No. 2, Desember 2019

BATIK *GEBLEK RENTENG* KULON PROGO :
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Cipta Produk Lokal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Rahadiyand Aditiya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
rahadiyand_aditiya@yahoo.co.id

Abstract:
HAKI is a wealth of all the products of the production of intelligence, such as technology, knowledge, art, literature, compositions of songs, written works, caricatures, etc. that are useful for humans. IPR management can have both positive and negative consequences. Therefore, researchers will see the results of community empowerment strategies through the management of intellectual property rights for local batik products together in Kulon Progo. Informants used qualitative research with informants using snowballs. Data collection techniques are done using observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with Bappeda and the Kulon Progo Regency industry, trade and ESDM department and the batik craft community in Kulon Progo. The Geblek renteng batik motif is a typical batik motif from Kulon Progo. Secondly, only the Kulon Progo community is permitted to produce joint-style geblek batik motifs. Third, there may not be artisans using batik stamps or printing in the making of geblek renteng batik motifs, fourth, providing training and capital assistance for batik craftsmen in the Kulon Progo region.

[HAKI merupakan salah satu lisensi yang memiliki legitimasi atas hak karya intelektual, seperti teknologi, pengetahuan, seni, literatur, komposi musik, karya tulis, karikatur, dan lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Namun, dalam pelaksanaan IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) memiliki dampak positif dan negatif bagi para pelaku usaha kreatif, seperti membatik. Olehnya, peneliti menelusuri hasil dari strategi pengembangan masyarakat melalui pengelolaan HAKI bagi produk batik di Kulon Progo. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode bola salju (*snowball*) sebagai metode pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara bersama BAPPEDA dan Dinas Industri Kabupaten Kulon Progo, Perdagangan dan ESDM, dan komunitas perajin batik di Kulon Progo. Motif Batik Geblek Renteng merupakan khas batik Kulon Progo. Kemudian, motif ini hanya dapat ditemukan pada komunitas perajin batik di Kulon Progo secara sah dan legal. Selanjutnya, tidak ada perajin batik yang menggunakan model printing (dalam memproduksi batik) dalam pembuatan Batik Geblek. Dan, para perajin Batik Geblek sudah terlatih sebagai perajin batik di Kabupaten Kulon Progo.]

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Copyright, Community Empowerment.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 14.000 pulau dengan 32 provinsi, 67.900 desa, dan berpenduduk sekitar 270 juta jiwa. Indonesia

memiliki kekayaan seni budaya dan hayati yang beragam juga potensial.[1] Di samping itu suku bangsa, sumber daya alam yang melimpah serta kreativitas penduduknya menjadikan Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi nasional yang perlu dikembangkan dan dilindungi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Jika kekayaan tersebut tidak dijaga dan dilindungi maka kekayaan ini akan diklaim oleh bangsa lain. Saat ini tidak sedikit kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang sudah diklaim oleh berbagai pihak, seperti yang dilakukan Malaysia. Terlebih di era perdagangan bebas (*free* market) ini, tingkat produksi yang hampir tidak dapat kita prediksi degan cepat dan tepat. Terkadang informasi lebih cepat daripada waktu itu sendiri. Dari kasus klaim kekayaan intelektuan, setidaknya terdapat tujuh kasus pengklaiman oleh Malaysia, *pertama,* pada November 2007, Malaysia mengklaim kesenian Reog Ponorogo. *Kedua*, pada Desember 2008, lagu “Rasa Sayange” yang berasal dari daerah Maluku menjadi sasaran pengklaiman oleh negara Malaysia. *Ketiga,* pada Agustus 2009, tari pendet dari Bali juga diklaim oleh Malaysia. *Keempat,* masih ditahun yang sama 2009 Malaysia kembali mengklaim kerajinan batik Indonesia. *Kelima,* pada Maret 2010 alat musik angklung yang diklaim. *Keenam* dan *ketujuh* pengklaiman dilakukan bersamaan yaitu tari tortor dan alat musik gordang sambilan. Semua pengklaiman tersebut selesai setelah ada protes dari Pemerintah Indonesia[2].

Kekayaan budaya Indonesia banyak macamnya seperti tari-tarian, pusaka-pusaka, artefak-artefak maupun sandang khas Indonesia salah satunya adalah batik. UNESCO bahkan mengakui kekayaan Indonesia tentang peninggalan bangsa Indonesia dalam *Masterpice Of The Oral and Intangible Heritage Of Humanity* adalah batik pada tahun 2009[3]. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki serta mengembangkan motif batik sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing untuk dijadikan identitas daerah, seperti motif batik khas Pekalongan, Cirebon, Solo dan juga Kulon Progo.

Pemerintah pusat dalam rangka menjaga dan melestarikan kearifan lokal khususnya batik dengan menghasilkan peraturan terkait. Peraturan Menteri Dalam

---

[1] Subroto Ahkan Muhammad and Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi* (Jakarta: Indeks, 2008), 118.

[2] “Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengkalim Budaya RI,” 2013.

[3] “Warisan Budaya Tak Benda,” n.d.

Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan menteri tersebut menganjurkan penggunaan pakaian sebanyak dua kali dalam seminggu yaitu hari kamis dan Jumat. Setelah kementerian dalam negeri menetapkan kebijakan itu maka daerah-daerah di seluruh Indonesia juga menindak lanjuti dengan edaran sejenis terkait penggunaan pakaian batik untuk pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah.

Tidak hanya mengikuti himbauan dari kementerian dalam negeri, Kulon Progo mengambil langkah inovatif dengan membuat motif batik khas Kulon Progo yang bernama *Geblek renteng*. Batik khas inilah kemudian yang dihimbau untuk digunakan oleh setiap kalangan mulai dari anak tingkat SD, SMP, dan SMA hingga Pegawai Negeri Sipil di Kulon Progo, dengan jumlah kebutuhan kain batik pertahunnya sebanyak 70.000 ribu.[4]

Kulon Progo menjadi menarik dikaji karena pemerintah merupakan institusi yang mengelola produk ini. Masyarakat Kulon Progo menjadi satu-satunya pengrajin yang boleh memproduksi Motif batik *geblek renteng*, meskipun yang menggunakan boleh dari setiap kalangan. Hal tersebut menjadikan peluang besar bagi pengrajin batik Kulon Progo untuk tetap bertahan dalam tuntutan global dewasa ini.

Pembangunan daerah adalah pergerakan dari suatu hal yang statis menjadi hal yang dinamis. Pembangunan dapat melalui pengelolaan produk lokal ataupun potensi lokal dengan strategi-strategi yang tepat sasaran. Strategi tersebut diaplikasikan menjadi sebuah program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini juga diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berkeinginan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal unggulan yaitu batik *geblek renteng* oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo?. Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan : Mengkaji bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal batik *geblek renteng* oleh pemerintah Daerah Kulon Progo.

---

[4] Sugeng Utomo and Dkk, “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2013,” 2011, 1102001.

Untuk mengetahui *novelty* dari penelitian ini, peneliti mencari penelitian terkait dengan hak kekayaan intelektual maka ada dua penelitian yang relevan, yaitu penelitiannya Romadhon pada tahun 2012 dan Pajar pada tahun 2013: Penelitian oleh Romadhon pada tahun 2012[5] menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan batik mulai ditinggalkan yaitu: *pertama,* minimnya kepedulian dan dukungan masyarakat dalam menjaga, memelihara dan melestarikan batik. *Kedua,* kurangnya fasilitas pemerintah. *Ketiga,* desakan pasar bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pembatik di Bantul mulai merasa kesulitan dalam *nguri-nguri* kebudayaan leluhur. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ingin diteliti. Letak perbedaannya adalah peneliti kali ini ingin melihat strategi pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kulon Progo dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal studi batik *geblek renteng*.

Penelitian oleh Pajar pada tahun 2013[6] berkesimpulan bahwa batik dalam tekanan. Terjadinya tekanan disebabkan oleh perubahan sosial kebudayaan karena penggunaan batik yang dulunya sebagai pakaian sehari-hari kini mulai ditinggalkan masyarakat. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sentuhan kebijakan. Seperti kebijakan Nomor 02 tahun 2007 perihal himbauan penggunaan batik oleh pegawai dan beberapa elemen masyarakat. Kemudian Pemkab juga menjadikan pelajaran batik sebagai pelajaran wajib di sekolah. Mengenai kebijakannya, kebijakan perihal batik dianggap sebagai kebijakan yang bersifat responsif. Perbedaan penelitian ini adalah, dari produknya, batik di Bantul tidak merupakan produk lokal unggulan, hanya sebagai produk kebudayaan leluhur. Sedangkan penelitian ini strategi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan produk lokal unggulan atau bisa disebut menjadi produk khas Kulon Progo yaitu batik *geblek renteng.*

Memilih kerangka atau landasan menjadi sangat penting guna menjawab rumusan masalah berdasarkan teori dan dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memperoleh kemudahan dalam suatu penelitian, dengan ini perlu penulis kemukakan beberapa kerangka teori dari rumusan masalah :

---

[5] M Noor Romadhon, “Arts (Batik) Under Pressure,” *Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus* 1, no. 1 (2012).

[6] Pajar Hatma Indra J, “Kebijakan Dan Pengembangan Masyarakat; Kisah Berkembangnya Batik Bantul,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* X, no. 2 (2013).

Sudah lebih dari 32 tahun pemerintahan daerah berada di bawah bayang-bayang pemerintah pusat dalam sistem otonom. Hal ini berubah dengan diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peran pemerintah daerah menjadi sentral dalam mengembangkan perekonomian dan kemajuan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan anggaran belanja daerah.

Pendapatan daerah perkotaan akan mengandalkan sektor pajak karena memang kegiatan sektor riil berjalan kompetitif. Hal ini berbeda dengan daerah pedesaan yang kegiatan pada sektor riilnya belum berjalan dengan sehat. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah khususnya pedesaan salah satunya adalah peningkatan pendapatan daerah dari sektor non-pajak. Caranya dengan mengembangkan produk-produk unggulan daerah dan menggali semua potensi daerah yang ada seoptimal mungkin. Pemerintah daerah seyogyanya menciptakan kebijakan yang mendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat juga dengan melakukan pemberdayaan yang dipikirkan secara seksama. Maka dari itu pemerintah daerah selaku penanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dapat membuat strategi pemberdayaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Tujuan dari pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat adalah memberikan *power* dan membentuk masyarakat mandiri, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau tidak berdaya. Perlu adanya strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Strategi sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia[7] memiliki makna siasat. Dapat juga diartikan sebagai suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam hal ini sasaran khusus yang dimaksud adalah pemberdayaan itu sendiri, lebih spesifik adalah pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Strategi pemberdayaan sendiri ragam macamnya, dapat disebut sebagai strategi I menurut Cholisin[8] yang memiliki 3 sisi yaitu Menciptakan Iklim,

---

[7] Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 860.
[8] Cholisin, "Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011," 2011.

memperkuat Daya dan melindungi. Menciptakan iklim agar dapat menjadikan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pendidikan masyarakat, akses ke dunia kesehatan serta akses menuju sumber-sumber perekonomian seperti teknologi, modal maupun informasi. Melindungi, sisi terakhir ini juga penting dalam melakukan pemberdayaan. Baik perlindungan yang lemah agar tidak kurang berdaya ketika bersaing dengan yang kuat, maupun perlindungan hak-hak yang seharusnya diperoleh bagi setiap manusia. hak kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya.

Selain itu menurut Suharto[9] Pengembangan Masyarakat seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerja sama dan proses belajar yang berkelanjutan. Sedangkan inti dalam pengembangan masyarakat yang harus dilakukan adalah Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan. Selain melihat 3 strategi yang dilakukan oleh colisin, peneliti juga ingin melihat 3 inti pengembangan masyarakat yang dimaksud oleh suharto.

Kebijakan publik menurut Dye, "Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is wathever governments choose to do or not to do*)"[10]. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Dalam konteks ini pemerintah daerah mencetuskan kebijakan dengan melakukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Menurut Edward III dan Sharansky seperti dikutip oleh Widodo dalam bukunya[11] bahwa, "Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah(*What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of* government *programs*)".

Maka dari itu, strategi pemberdayaan diharapkan dapat menjadi ruh dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Baik itu secara

---

[9] Edi Suharto, "Kebijakan Sosial Dan Pengembangan Masyarakat: Prespektif Pekerja Sosial," 2009, 3.

[10] Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

[11] Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Banyumedia, 2007).

langsung maupun tidak. Agar kesejahteraan masyarakat tercapai dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan objek yang dijadikan bahan kajian adalah batik *geblek renteng* di daerah Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober hingga November 2013, penelitian ini adalah kegiatan dana hibah BOPTN tahun 2013 yang belum pernah di publikasi sebelumnya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena *pertama*, pendekatan ini bersifat deskriptif, sehingga memudahkan dalam memulai alur cerita. *Kedua*, pendekatan ini lebih mampu menjawab bagaimana dampak perekonomian masyarakat daerah Kulon Progo setelah pemerintah daerah melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual. *Ketiga*, pendekatan ini mampu mengakrabkan hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian, saat berpartisipasi guna melakukan pencatatan fakta-fakta di lapangan. Selain itu juga dapat menemukan realita di lapangan agar dijadikan temuan dan untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Subjek penelitian adalah masyarakat daerah yang terkena langsung kebijakan pengelolaan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini pengrajin batik untuk *geblek renteng.* Informan lain yang terkait erat dengan kebijakan tersebut pembuat kebijakan yaitu dinas-dinas yang berperan langsung dalam mengurusi industri ini.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan digabungkan dengan teknik bola salju. Penarikan informan juga berdasarkan kriteria. Pemilihan kriteria ini dilakukan karena sampel yang akan diambil harus memiliki kriteria tertentu. Menurut Spredly Terdapat 3 kriteria untuk memilih subyek penelitian seperti yang dikutip Basrowi dan Suwandi dalam bukunya[12] *pertama,* sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian. *Kedua,* terlibat penuh dalam kegiatan penelitian dan *ketiga,* memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasinya. Banyak macam cara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi[13]. Teknik validitas data penelitian ini menurut buku metode penelitian kualitatif[14] adalah

[12] Suwardi and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka, 2008), 188.

[13] *Ibid*,hal. 188.

[14] Lexy J Moeloeng, *Meotde Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010), 324–28.

perpanjang keterlibatan, ketekunan peneliti atau pengamatan dalam bentuk atau berbagai macam kegiatan yang terlaksana dan juga menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data[15] yang dibuat oleh Miles dan Huberman atau biasa disebut dengan analisis interaktif, model ini terdiri atas tiga komponen, yaitu *Pertama,* reduksi (penyederhanaan data), *Kedua* penyajian data, dan *ketiga* penarikan kesimpulan dan verifikasi.

B. Potensi Batik *geblek renteng* di Gulurejo, Lendah, Kulon Progo

Penelitian ini ingin meneliti pada bagain selatan wilayah Kulon Progo. Lebih spesifik, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai batik geblek renteng. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil wilayah sentra batik di Kulon Progo yaitu Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah. Kecamatan Lendah termasuk daerah selatan dari kabupaten Kulon Progo, daerah ini merupakan dataran rendah kisaran 0-100 meter dari permukaan laut. Ledah memiliki luas sekitar 3.559,192 Hektar atau kisaran 6,07% dari jumlah keseluruhan luas wilayah kabupaten Kulon Progo.

Kecamatan ini memiliki 6 desa atau Kelurahan yaitu Wahyuharjo, Bumirejo, Jatirejo, Sidorejo, Gulurejo, Ngentakrejo. Dari 6 desa tersebut terdapat 62 pedukuhan, 107 RW dan 346 RT[16]. Jumlah penduduk daerah yang berjarak sekitar 14 kilometer dari ibukota kabupaten ini sebanyak 36.447 Jiwa dengan presentasi pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen.

Daerah Lendah adalah pengrajin batik. Lebih spesifik adalah daerah Gulurejo dan Ngentakrejo. Banyak perajin di kedua daerah tersebut tetapi Gulurejo menjadi daerah pertama yang memproduksi batik sandang.

Kelurahan Gulurejo jika dilihat dari wilayahnya, terbagi menjadi 10 pedukuhan 28 Rukun Warga dan 65 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk daerah ini sebanyak 7.662 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari usaha penduduknya, daerah ini memiliki tiga jenis perajin, yaitu perajin Batik, perajin Tembaga(perak dan kuningan) dan perajin anyam-anyaman bambu. Untuk perajin tembaga mengalami penurunan setelah adanya bom Bali dan gempa bumi di Yogyakarta yang notabene adalah tujuan pasar dari hasil kerajinan tersebut.

---

[15] J Moeloeng, Metodologi *Penelitian Kualitatif. 2017.* hal. 280.
[16] Tim Penulis, “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011” (Kulon Progo, 2011).

E-ISSN: 2540-9182
P-ISSN: 2086-3357

Lain halnya dengan perajin batik, perajin ini masih tetap bertahan dan semakin merebak. Terdapat empat dusun yaitu Dusun Gegulu, Sembungrejo, Wonolopo dan Mendiro yang yang banyak memproduksi batik. Berikut Batas wilayah Gulurejo: wilayah utara berbatasan dengan Desa Ngentakrejo, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo, wilayah barat berbatasan dengan Desa Sri Kayangan, Sentolo dan wilayah timur berbatasan dengan Sungai Progo.

Kulon Progo merupakan daerah yang belum termasuk daerah perkotaan. Maka dari itu perputaran perekonomian masih belum sebaik perkotaan. Menurut staf Bappeda bidang Kesejahteraan masyarakat yaitu ibu Sri bahwa belanja terbesar didominasi oleh belanjanya pemerintah(baik itu pegawai maupun proyek pemerintah) seperti kata beliau:

> *"Karena di sini memang daerahnya masih daerah-daerah berkembang ya dek ya..... Jadi belanja terbesar di kabupaten itu masih belanja pemerintah gitu..."*[17]

Hal ini dianggap potensi oleh pemerintah, menurut data tahun 2011 yang dibuat oleh BPS Kulon Progo dalam katalognya bahwa terdapat 11.794[18] pegawai pemerintah dan perangkat desa. Jumlah pegawai dan perangkat desa tersebut ingin di manfaatkan betul oleh pemerintah, cara yang dilakukan adalah dengan mencanangkan penggunaan batik geblek renteng khusus hari kamis untuk seluruh pegawai dan perangkat desa.

Ternyata pencanangan tersebut tidak hanya diberikan kepada pegawai pemerintahan, tetapi seluruh elemen pendidikan dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) hingga Sekolah Tinggi Lanjutan Atas (SLTA). Menurut bupati Kulon Progo Hasto menyatakan bahwa:

> *"Jumlah pelajar dari SD hingga SLTA di Kulon Progo ini sekitar 60 ribu orang, ditambah sekitar 10.000 PNS. Jika mereka mengenakan seragam*

[17] Wawancara Dengan Budiarti, 24/10/2013
[18] Penulis, "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011," 22.

batik sehari dalam satu minggu, butuh 70.000 lembar kain batik. Ini sudah potensi yang luar biasa,"[19]

Tabel 1. Presentasi jumlah siswa pada tahun 2011

No	Tingkatan Sekolah	Murid/ Siswa
1.	TK-SD	45.035
2.	SMP-SMA	35.770

Data diolah dari Katalog BPS Kulon Progo 2011

Perlu diketahui, harga batik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD) berkisar 25 ribu- 30 ribu. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berkisar 60 ribu-80 ribu. Sedangkan untuk pegawai(dewasa) berkisar 70 ribu- 120 ribu. Potensi yang luar biasa jika dikalikan dengan berapa jumlah siswa dan pegawai.

C. Sejarah Batik dari Zaman Sir Thomas di Inggris hingga Zaman Bapak Hasto di Kulon Progo

Batik pertama kali dikenal dunia pada saat batik diceritakan dalam buku *History Of Java* yang di tulis oleh Sir Thomas Stanford Raffles pada tahun 1817. Ia adalah Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Kemudian pada tahun 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam kemudian barulah pada awal abad ke-19 batik mulai mencapai masanya. Batik juga pernah dipamerkan pada *Exposition Universelle* di Paris pada tahun 1900 batik Indonesia memukau publik dan seniman.

Jauh ke abad 20, jejak-jejak batik mulai muncul ke hadapan publik kembali. Hal tersebut datang dari sebuah kabupaten kecil yang sebelumnya(tahun 2006) terkena amukan gempa bumi. Kabupaten tersebut adalah Bantul. Peraturan bupati nomor 02 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan hari kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hari kerja ini berimbas pada penggunaan baju

[19] Tim Penulis, "Pelajar Kulon Progo Kudu Pakai Batik Geblek Renteng," www.tempo.co, 2012, http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng.

batik menjadi hari kamis dan hari Jumat. Aturan ini dibarengi dengan pendisiplinan dalam bentuk *punishment* (sangsi atau hukuman) pegawai yang tidak mengikuti peraturan tersebut.

Dua tahun berselang, pada tahun 2009 terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Malaysia mengklaim kerajinan batik miliki Indonesia. Tetapi ditahun yang sama pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi (*Masterpieces Of The Oral And Intangibel Heritage Of Humanity*) milik Indonesia. Dengan penetapan tersebut, sudah tidak dapat dipungkiri kembali bahwa Indonesia adalah pewaris kerajinan batik tersebut. Penetapan ini memiliki efek turunan, pemerintah pusat membuat peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2009 tentang perubahan pertama atas peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2007 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah. Dalam aturan baru ini batik dijadikan pakaian dinas yang tidak hanya digunakan seminggu sekali oleh kementerian dalam negeri, tetapi menjadi dua kali yaitu hari kamis dan Jumat.

Tidak jauh dari kabupaten Bantul, kabupaten 'tetangga' pun membuat gebrakan yang sedikit berbeda. Tidak hanya mewajibkan pegawainya untuk menggunakan batik, tetapi Kulon Progo membuat motif batik yang menjadi motif batik khas Kulon Progo. Geblek renteng, itulah nama dari corak berbentuk angka delapan yang berenteng atau berantai.

Perlu diketahui, ide pembuatan corak batik khas Kulon Progo berawal pada saat Audiensi FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Kabupaten Kulon Progo di ruang kerja Bupati pada tanggal 8 Desember 2011 dan kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan lomba desain motif batik khas Kulonrogo[20]. Sejalan dengan data tersebut, menurut Dewantoro21 bahwa "desain batik itu(geblek renteng*)kan awalnya dari lomba, yang menangkan itu anak SMA".* Lomba desain motif batik khas Kulon Progo tingkat Nasional kemudian perlombaan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

[20] Tim Penulis, "Sejarah Lahirnya Motif Batik Khas Kulon Progo Geblek Renteng," KulonProgokab.go.id, n.d.

[21] Wawancara dengan kepala bidang industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013.

pada tanggal 1 Februari 2012. Terdapat beberapa tujuan[22] yang diharapkan dalam lomba desain motif batik khas Kulon Progo seperti : a) Melestarikan dan mengembangkan seni budaya batik., b) Menggali ide kreativitas dan apresiasi masyarakat dalam merancang motif batik., c) Meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya batik, d) Menciptakan corak ragam batik baru bermotif kekhasan Kabupaten Kulon Progo sebagai jati diri batik Kulon Progo, e) Meningkatkan promosi batik, dan f) Memajukan industri batik di Kulon Progo, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lomba ini ditutup pada tanggal 30 April 2012 dan diikuti oleh 304 peserta dari berbagai daerah. Terdapat 392 karya desain motif batik dari keseluruhan peserta yang mengikuti perlombaan. Setelah semua karya terkumpul, pada tanggal 1-2 Mei 2012 dilaksanakan proses penjurian dengan melihat, mencermati dam mempelajari filosofi motif batik, dan menghasilkan 6 karya nominasi. Langkah penjurian ini juga melibatkan perajin batik bertujuan memberikan saran, terutama pengaplikasian desain menjadi kain batik.

Berdasarkan penilaian Juri ada beberapa nominasi desain batik antara lain dengan judul; Kulon Progo Binangun, Angguk Putri, Manggis, Ceplok Kulon Progo dan Geblek renteng. Dari beberapa desain tersebut terpilihlah "Geblek renteng" sebagai nominator terbaik motif baru batik khas Kulon Progo, dan diumumkan secara resmi melalui berbagai media pada hari Minggu 6 Mei 2012. Mulai saat itu motif geblek renteng diperkenalkan, disosialisasikan, diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat luas serta dijadikan motif khas asli Kulon Progo dan merupakan salah satu ikon Kabupaten Kulon Progo.

Menurut data yang diperoleh peneliti23, batik geblek renteng sudah terdaftar hak ciptanya dengan nomor 060873 pada tanggal 11 Oktober 2012. Pencipta desain ini adalah seorang siswa bernama Alex Candra Wibawa. Pemegang hak cipta ini sendiri adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo.

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kulon Progo

   Pembangunan daerah merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, yang perlu adanya pemikiran matang dengan melibatkan berbagai elemen

[22] Wawancara dengan kepala bidang industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013,

[23] Data olahan, diperoleh dari salah satu staf di dinas koperasi pada tanggal 01 november 2013.

yang saling bersinergi. Pemerintah memiliki berbagai macam satuan kerja pendukung, yang bertugas untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Peneliti akan melihat strategi pemerintah bersama satuan kerja perangkat daerah yang sudah direncanakan maupun sudah dilaksanakan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo

Sebagai badan yang menciptakan konsep dalam pembangunan daerah Kulon Progo, Bappeda memiliki strategi dalam mengembangkan industri batik di Kulon Progo. Terapat beberapa langkah yang dikonsepkan oleh Bappeda[24] seperti:

3. Kamis Harinya Geblek renteng

Intervensi dengan 'memanipulasi pasar' ini dilakukan dalam bentuk himbauan kepada seluruh instansi pemerintahan. Himbauan untuk menggunakan batik dengan motif khas Kulon Progo yaitu motif *geblek renteng.* Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan perekonomian perajin batik. Jika pesanan meningkat maka produksi akan terus berjalan dan jika produksi berjalan maka asap dapur perajin akan tetap mengepul. Tidak hanya mengepul, jika permohonan batik meningkat bukan tidak mungkin kesejahteraan perajin juga meningkat karena pemasukan yang juga meningkat.

4. Penyertaan Modal, Barang, Pelatihan, Pemasaran dan Kelancaran Produksi

Pemerintah memberikan berbagai macam bantuan seperti penyertaan modal. Pelatihan pernah dilakukan terhadap sekitar 30 orang yang tersebar dari beberapa daerah di Kulon Progo. Setelah pelatihan tersebut diberikan barang-barang produksi seperti kompor, malam, canting, tabung, kain dan beberapa barang penunjang produksi. Pemasaran yang dilakukan oleh Bappeda adalah menyertakan perajin untuk mengikuti pameran-pameran. Setidaknya membawa karya perajin dalam acara pameran agar motif *kash* Kulon Progo dapat dikenal luas.

Bantuan Kelancaran Produksi yaitu peralatan dan pengelolaan limbahnya. Bantuan ini bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jawa dan Madura.

[24] Wawancara dengan Budiarti, 24/10/2013

Detail Engeneering Disgn (DED) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) batik di Desa Gulurejo Kecamatan Lendah yang bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa (PPEJ) telah selesai. Bangunan fisik senilai 600 juta ini diharapkan selesai pada tahun 2014. Menurut kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) pembangunan IPAL ini diharapkan dapat mengatasi limbah batik[25].

Jika disimpulkan, kurang lebih terdapat lima konsep yang sudah dibuat oleh BAPPEDA dalam strategi pemberdayaan produk lokal batik geblek renteng. Manipulasi pasar, penyertaan modal, barang, pelatihan, pemasaran dan kelancaran produksi. Untuk lebih menjelaskan hal teknis mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti akan menjabarkan rencana apa saja yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Deperindag dan ESDM)

Kepala daerah memiliki satu visi dalam pembangunan jangka menengah dan memiliki 6 misi. Salah satu misi tersebut adalah Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Menurut peneliti ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi ketiga dari enam yang lainnya ini memiliki tujuan Untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo berkualitas dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan keunggulan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam mewujudkan visi misi kepala daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memposisikan dinasnya untuk mewujudkan visi melalui beberapa misi yang dianggap sesuai dengan ranah kerja dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM serta

[25] Tim Penulis, “Kulon Progo Siap Atasi Limbah Batik,” Krjogja.com, n.d., krjogja.com/m/reed/192365/Kulon Progo-siap-atasi-limbah-batik.kr.

Dinas Koperasi yang dianggap memiliki andil dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara teori dengan realita yang ada di Kulon Progo. Strategi pemberdayaan menurut Cholisin[26] yang memiliki 3 sisi yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi. Pemerintah melakukan ketiga hal tersebut dengan beberapa tambahan strategi yang dirasa perlu. Sisi strategi pemberdayaan pertama yaitu menciptakan iklim, pemerintah melakukan strategi ini diwujudkan dalam tujuan misi nomor 2 SKPD yang berbunyi Membentuk iklim usaha yang produktif, efisien dan dinamis dengan strateginya adalah Peningkatan kualitas usaha perdagangan. Sisi yang kedua adalah memperkuat daya, di sini pemerintah mewujudkannya dalam bentuk program peningkatan kapasitas iptek dan sistem produksi, pembinaan kemampuan teknologi industri serta pembinaan-pembinaan lainnya yang sudah dijabarkan dalam tabel di atas. Sedangkan sisi terakhir dalam strategi pemberdayaan adalah melindungi. Pemerintah melakukan perlindungan dengan mendaftarkan batik *geblek renteng* sebagai batik khas daerah Kulon Progo. Hal tersebut sudah dilakukan dengan nomor pendaftaran 060873 pendaftaran hak cipta, tertanggal 11 Oktober 2013 dengan pemegang hak ciptanya adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo.

6. Regulasi Bidang Perindustrian: *No Printing and Just For Kulon Progo society*

Regulasi menarik yang dikeluarkan oleh perindustrian adalah tidak boleh ada alat *printing* untuk membuat batik di Kulon Progo. Hal tersebut disampaikan oleh Dewantoro[27] :

> *"Coba dibayangkan mas, jika 1000 lembar batik secara manual dapat mempekerjakan 15 orang, sedangkan jika menggunakan perinting hanya butuh 3 orang. Hal ini hanya menguntungkan yang punya modal besar mas."*

[26] Cholisin, "Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011."

[27] Wawancara dengan Kepala Bidang Industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013.

Memang cukup aneh jika teknologi penunjang perindustrian justru dibatasi keberadaannya. Tetapi, jika melihat penjelasan tersebut, pemerintah memiliki maksud tersendiri. Tujuan pemerintah adalah untuk melindungi perajin kecil dan melindungi masyarakat menengah ke bawah, dengan menciptakan ekonomi kerakyatan.

Strategi penunjang lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan hanya memberikan kesempatan memproduksi batik khas Kulon Progo oleh warga asli daerah. Hal ini sejalan dengan semangat bela-beli Kulon Progo[28]. Jika yang memproduksi hanya boleh warga asli Kulon Progo akan menyerap tenaga kerja warga asli, kemudian hasil yang diperoleh dari regulasi ini akan dirasakan oleh warga Kulon Progo sendiri.

D. Strategi Pemberdayaan yang Tepat Sasaran

Strategi pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah banyak macamnya, tetapi strategi tersebut akan lebih bijak jika tepat sasaran. Peneliti ingin mengkategorikan strategi pemberdayaan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Perajin Besar Pemberdayaan dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

   Perajin besar, memerlukan pemberdayaan yang tidak hanya sebatas pelatihan dan sosialisasi peminjaman modal. Perajin besar sudah memiliki keahlian sehingga tidak perlu adanya pelatihan pembuatan batik. Begitu pula dengan peminjaman modal, perajin besar sudah memiliki pasar yang jelas dan berjalan secara kondusif. Sehingga akses terhadap permodalan sebaiknya dapat diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan.

   Maka dari itu, pemberdayaan yang dilakukan sebaiknya difokuskan kepada limbah yang dihasilkan oleh perajin besar ini. Contoh kasus Batik Farras, pemerintah seyogyanya mengelompokkan perajin sekaliber batik *farras* untuk melakukan pemberdayaan pengelolaan limbah. Pengelompokan

[28] Pada saat peneliti berkunjung ke dinas koprasi Kulon Progo, terdapat banyak karung beras yang berada diatas meja pegawai. Setelah peneliti tanyakan, ternyata beras tersebut adalah beras lokal Kulon Progo yang dibeli oleh seluruh karyawan. Hal ini dilakukan hampir disetiap SKPD Kulon Progo. Sehingga semangat bela-bei Kulon Progo benar-benar digaungkan mulai dari pegawai pemerintah sendiri. Wawancara dengan salah satu staf Dinas Koprasi Kulon Progo, 01/11/2013

berbasis lapangan ketika melaksanakan pemberdayaan program dan kegiatan ini efektif dan tepat sasaran.

2. Perajin Menengah Pemberdayaan dengan Memberikan Akses Permodalan dan Membantu Pemasaran

Perajin menengah ini adalah perajin yang sudah memiliki kemampuan yang mumpuni dengan bukti sudah dapat menghasilkan karya. Perajin kelas menengah ini sudah memiliki pengalaman dalam pembuatan.

Contoh studi batik Sambayung, batik ini sudah memiliki kemampuan untuk membuat batik, memiliki jaringan beberapa perajin sekitar dan juga memiliki tempat untuk dijadikan art galery. Maka dari itu, batik ini dapat dikategorikan batik menengah.

Pemberdayaan yang dilakukan sebaiknya adalah pemberian akses permodalan. Untuk memproduksi lebih banyak batik, perajin kategori ini terhambat permasalahan modal. Sedangkan jika sudah memproduksi banyak, kategori ini selayaknya dibantu dalam pemasarannya. Pemerintah memiliki andil dalam proses pemasaran ini.

3. Perajin Kecil Memerlukan Pelatihan

Perajin kategori ini adalah masyarakat yang memiliki minat atau keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai perajin batik. Kategori ini masih belum memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dunia batik.

Contoh kasus adalah ibu Etik yang sudah pernah mengikuti pelatihan, tetapi masih belum cukup memiliki pengetahuan. Dalam kategori ini strategi pemberdayaannya adalah dengan memperkuat daya melalui pelatihan membatik. Jika kemampuan membatik sudah dimiliki atau sudah termasuk dalam kategori menengah, barulah strategi pemberdayaannya diubah sesuai dengan kategori menengah.

E. Simpulan

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan melalui pengelolaan produk lokal batik *geblek renteng* di laksanakan oleh Bappeda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. Kedua dinas tersebut memiliki rencana masing-masing dalam melakukan strategi pemberdayaan. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai strategi pemberdayaan menurut masing-masing dinas *pertama*, Dinas Badan

Pengembangan dan Pembangun Daerah (Bappeda). Bappeda memiliki beberapa sub bagian, bagian kesejahteraan merupakan bagian yang mengonsep strategi pemberdayaan. Berikut beberapa konsep yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah Kamis Harinya *Geblek renteng* dan penyertaan modal, barang, pelatihan, pemasaran dan kelancaran produksi. *Kedua,* Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Deperindag dan ESDM). Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) ini merupakan dinas yang bersentuhan langsung dengan perindustrian batik. Peran dinas ini menjadi sangat penting berikut strategi pemberdayaan yang dilakukan: 1) Rencana Strategis Dinas Perindustrian, 2) Strategi pengembangan dan pemberdayaan industri kecil menengah menggunakan tiga kebijakan: mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah, mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah dan meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia industri kecil menengah. 3) Regulasi bidang perindustrian: *no printing and just for kulon progo society.*

Peneliti juga menemukan akan perlu adanya strategi yang tepat sasaran dalam melakukan pemberdayaan. strategi yang tepat sasaran dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bagian, berikut pembagian strategi tepat sasaran yang dikemukakan oleh peneliti: 1) perajin besar pemberdayaan dengan intalasi pembuangan air limbah(IPAL), 2) perajin menengah pemberdayaan dengan meberikan akses permoodalan dan membantu pemasaran, dan 3) perajin kecil memerlukan pelatihan. Kesemua strategi pemberdayaan sudah dikonsep dan sebagian sudah dilakuakan oleh pemerintah. Konseo-konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan dari para perajin yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

AG, Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ahkan Muhammad, Subroto, and Suprapedi. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: Indeks, 2008.

Cholisin. “Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian

Tahun 2011," 2011.

Hatma Indra J, Pajar. "Kebijakan Dan Pengembangan Masyarakat; Kisah Berkembangnya Batik Bantul." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* X, no. 2 (2013).

J Moeloeng, Lexy. *Meotde Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2010.

"Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengkalim Budaya RI," 2013.

Noor Romadhon, M. "Arts (Batik) Under Pressure." *Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus* 1, no. 1 (2012).

Penulis, Tim. "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011." Kulon Progo, 2011.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

———. "Kulon Progo Siap Atasi Limbah Batik." Krjogja.com, n.d. krjogja.com/m/reed/192365/Kulon Progo-siap-atasi-limbah-batik.kr.

———. "Pelajar Kulon Progo Kudu Pakai Batik Geblek Renteng." www.tempo.co, 2012. http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng.

———. "Sejarah Lahirnya Motif Batik Khas Kulon Progo Geblek Renteng." KulonProgokab.go.id, n.d.

Suharto, Edi. "Kebijakan Sosial Dan Pengembangan Masyarakat: Prespektif Pekerja Sosial," 2009.

Suwardi, and Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka, 2008.

Utomo, Sugeng, and Dkk. “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2013,” 2011, 1102001.

“Warisan Budaya Tak Benda,” n.d.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia, 2007.